

**Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem
Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel
Moderasi (Studi kasus pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten
Ketapang)**

ABDUL KHABIR

AKUNTANSI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris mengenai pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern serta kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten ketapang. Data penelitian ini diperoleh dengan cara mengisi kuesioner. Kuesioner diberikan kepada responden aparatur sipil negara yang memiliki tanggung jawab di bidang Akuntansi Keuangan dan Pelaporan di satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Ketapang. Didalam penelitian ini data di olah dengan menggunakan *Partial Least Square*. Hasil penelitian menunjukkan hipotesis pertama di terima yaitu variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap variabel laporan keuangan pemerintah daerah. Hipotesis kedua penelitian ini juga di terima yaitu variabel sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap variabel Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hipotesis ketiga, yaitu Kompetensi Sumber daya manusia sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap hubungan variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah dan Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dan pada hipotesis ke empat yaitu variabel kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi tidak signifikan dalam mempengaruhi Sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam hal ini, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, perlu juga ditingkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam implementasi sistem pengendalian internal yang baik agar dapat lebih efektif dalam memastikan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Kata Kunci : Pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, laporan keuangan pemerintah daerah.

**PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
(SAP) DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI) TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)
DENGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

(Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang)

RINGKASAN SKRIPSI

A. Latar belakang penelitian

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diperoleh informasi dari 541 hasil laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2020, diungkapkan 486 (90%) LKPD memperoleh predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP), 49 (9%) LKPD memperoleh predikat opini wajar dengan pengecualian (WDP), 4 (0,7%) memperoleh predikat opini tidak menyatakan pendapat (TMP), dan 2 (0,3%) memperoleh predikat opini tidak wajar (TW). Pemerintah yang Laporan Keuangan Pemerintah Daerahnya tidak mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) disebabkan karena masih banyaknya kelemahan pada Sistem Pengendalian Internal dan Permasalahan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan (BPK, 2020)

Selain itu, dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mengungkap 6.809 temuan yang memuat 11.662 permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan tersebut terdiri dari 5.367 terkait kelemahan sistem pengendalian internal dan 6.295 terkait ketidakpatuhan terhadap undang-undang (BPK, 2020).

Maka dari itu, dalam proses penyusunan laporan keuangan sangat diperlukan yang namanya Standar akuntansi pemerintah (SAP), Standar akuntansi pemerintah ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. SAP merupakan pedoman atau petunjuk dalam kegiatan penyusunan dan menyajikan laporan keuangan, Mulai dari proses pencatatan, pembukuan sampai dengan proses pelaporan. Adapun tujuan berpedoman pada SAP (PP No.71 Tahun 2010) ini adalah untuk mempermudah ASN bagian keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Penerapan dan pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah ini di percaya dapat menjadi cara penyelesaian untuk setiap permasalahan keuangan yang terjadi dalam organisasi pemerintahan sebagai wujud untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk menguji pengaruh sumber daya manusia sebagai variabel moderasi terhadap pemahaman standar akuntansi pemerintah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk menguji pengaruh sumber daya manusia sebagai variabel moderasi terhadap sistem pengendalian internal dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

C. Metode Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasi.

b. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang berada di bidang Sub Bagian Keuangan Satuan perangkat daerah.

c. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.

d. Teknik pengambilan sampel

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan pada penelitian ini terhadap responden menggunakan cara *purposive sampling*.

e. Data dan jenis data

Teknik Pengumpulan Data didalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan/membagikan kuesioner kepada sampel penelitian. Survey Kuesioner merupakan metode survei yang menggunakan kuesioner didalam proses penelitian, dimana kuesioner akan diserahkan langsung kepada narasumber.

f. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data structural equation modeling (SEM) dengan menggunakan software WarpPLS versi 8.0 untuk menguji pengaruh pemahaman standar standar akuntansi dan sistem pengendalian internal serta kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Analisis warpPLS merupakan pengembangan dari analisis PLS.

PLS adalah metode analisis yang powerfull karena dapat digunakan pada semua skala data, dan tidak membutuhkan banyak asumsi dan ukuran sampel yang tidak harus besar. Selain itu, PLS juga dapat digunakan sebagai uji hipotesis dan juga dapat digunakan untuk

membangun pengaruh yang belum ada teorinya atau pengujian proposisi. Dalam penelitian analisis data yang dilakukan terdiri dari analisis statistik deskriptif, evaluasi model pengukuran (*outer model*), evaluasi model struktural (*Goodness of Fit/ inner model*) serta uji moderasi dengan alat analisis jalur (*path analysis*) menggunakan software Warp PLS 8.0. Analisis jalur (*path analysis*) untuk mengetahui hubungan langsung maupun tidak langsung dari variabel bebas dan variabel terikat yang diteliti.

D. Hasil Penelitian

1. Hipotesis 1

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti semakin baik pemahaman standar akuntansi pemerintah, semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Adanya pemahaman standar akuntansi pemerintah yang baik akan memudahkan entitas dalam menyusun laporannya secara konsisten dan akurat, sehingga dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif.

2. Hipotesis 2

Dalam hasil pembahasan, path coefficient untuk variabel x2 (SPI) adalah 0.482 dan p-value < 0.001, sehingga hipotesis 2 diterima. Artinya, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara SPI dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa SPI menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam hal ini, penerapan SPI yang baik akan memastikan bahwa laporan keuangan dihasilkan dengan baik, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Oleh karena itu, hasil ini memberikan implikasi penting bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan implementasi SPI dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Hipotesis 3

Dari hasil pengujian, ditemukan bahwa nilai path coefficient dari interaksi antara Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Y) yaitu $Y \times X1$ adalah -0,273. Artinya, semakin tinggi nilai pemahaman standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia, maka semakin rendah nilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Selain itu, ditemukan juga bahwa nilai p-value dari $Y \times X1$ adalah 0,012, yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara interaksi antara Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4. Hipotesis 4

Hipotesis 4 menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia memoderasi hubungan antara sistem pengendalian internal dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai path coefficient untuk interaksi antara x_2 dan Y ($Y \cdot X_2$) adalah -0,107, sedangkan nilai p-value adalah 0,197. Karena nilai p-value lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditentukan, yaitu 0,05, maka hipotesis 4 tidak dapat diterima.

Meskipun interaksi antara sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia memiliki koefisien negatif, hal ini tidak dapat dijadikan sebagai indikasi bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut negatif. Sebaliknya, hasil ini menunjukkan bahwa interaksi tersebut tidak signifikan dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

E. Implikasi dari Hasil Uji Hipotesis

Dalam keseluruhan, hasil uji hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, kompetensi sumber daya manusia juga terbukti memoderasi hubungan antara pemahaman standar akuntansi pemerintah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, tidak ditemukan bukti bahwa kompetensi sumber daya manusia memoderasi hubungan antara sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kompetensi sumber daya manusia mencakup keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan dalam melakukan tugas-tugas akuntansi dan pelaporan keuangan.

F. Kesimpulan

Pertama, pemahaman standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman standar akuntansi pemerintah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kedua, kompetensi sumber daya manusia (SDM) memoderasi (positif) hubungan antara pemahaman standar akuntansi pemerintah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya, peningkatan kompetensi SDM dapat memperkuat pengaruh positif dari pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Ketiga, tidak terdapat bukti yang signifikan bahwa kompetensi SDM memoderasi hubungan antara sistem pengendalian internal dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi SDM tidak secara signifikan memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Keempat, dalam penelitian ini terdapat indikasi bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah pada pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pemahaman standar akuntansi pemerintah dan pelatihan kompetensi SDM. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang lebih serius dan terstruktur dalam meningkatkan pemahaman standar akuntansi pemerintah dan kompetensi SDM pada pemerintah daerah, sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.